

PERANAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK-HAK UMAT ISLAM (KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA)

Afriadi bin Sanusi

Dosen Ilmu Fiqh, Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia

Abstract: *This paper compares the social role of sharia courts in Indonesia and Malaysia. It pays particular attention to the extent to which the role of the Sharia courts in these countries allows the court to protect the religious rights of Muslims about Halal food consumption. Through the comparative analysis, it is understood that the authority vested in religious courts Indonesia and Malaysia still a extension of government authority and not fully execute the provisions of the Koran and hadith. In addition, there is a difference between the two, in which the religious court in Malaysia has no authority in matters of Islamic banking and Islamic insurance, while the Indonesian Religious Courts in charge of the affair. Nevertheless, both the religious courts have sought to ensure the protection of the rights of Muslims, so that they always get justice in accordance with their religious beliefs.*

Keywords: *comparative analysis, sharia courts, rights of muslims.*

Abstrak: Tulisan ini membandingkan peran sosial pengadilan syariah di Indonesia dan Malaysia. Ia menjawab perhatian khusus mengenai sejauh mana peran pengadilan syariah pada kedua negara tersebut untuk melindungi hak-hak keagamaan umat Islam tentang konsumsi makanan halal. Melalui analisis komparatif, dapat dipahami bahwa kewenangan berada di tangan pengadilan agama Indonesia dan Malaysia masih perpanjangan otoritas pemerintah dan tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, ada perbedaan antara keduanya, di mana pengadilan agama di Malaysia tidak memiliki wewenang dalam hal perbankan syariah dan asuransi syariah, sementara Pengadilan Agama Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan tersebut. Namun demikian, kedua pengadilan agama telah berusaha untuk menjamin perlindungan hak-hak umat Islam, sehingga mereka selalu mendapatkan keadilan sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Kata Kunci: analisis komparatif, pengadilan syariah, hak-hak muslim.

Pendahuluan

Hukum Islam telah ada di Nusantara semenjak berdirinya kerajaan Islam di kepulauan ini pada pertengahan abad ke-13. Seperti yang terdapat pada Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Kasusultanan Malaka, Kasusultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa

dan Kasusultanan Ternate serta Tidore. Kasusultanan-kasusultanan tersebut menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku.

Pengadilan adalah sebuah forum publik resmi, di mana kekuasaan awan ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hak sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Sementara Mahkamah Syariah merupakan tempat dimana seseorang mendapat keadilan yang mengadili perkara berkaitan dengan undang-undang Islam.¹ Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.³

Hak

Menurut al-Shatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat* ada dua tujuan syara', dalam Islam yaitu: untuk menolak kebinasaan dan mencapai kemaslahatan, *daf'u al mafasid wa jalbu al-masalih*. Metode ini beliau uraikan menjadi lima macam "maqasyid al-syar'iyah, yaitu: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga harta. Lima tujuan syara tersebut juga digunakan sesuai dengan tiga keadaan yaitu: Daruriyyah, Hajiyyah dan Tahsiniyyah.⁴

Hak secara bahasa berarti memiliki, ketetapan, kepastian, harta dan sesuatu yagn ada serta pasti. Hak juga mencakupi segala hal-hal yang bersifat materi dan non materi, seperti pada istilah hak Allah Swt, Dan hak hamba. Hak adalah juga

¹ www.wikipedia.com, akses 12 April 2013.

² Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1.

³ *Ibid.*, Pasal 2.

⁴ Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *Muwafaqat Nazariyat Al-Maqwasid Inda Al-Imam Al-Shatibi*, Jilid II, (Riyadh: Al-Ma'ahd Al-Islam Lil Fikr Al-Islami, 1992), hlm. 152-160.

sesuatu kekhususan terlindung yang tidak dapat diganggu gugat.⁵ Hak adalah sesuatu kekhususan, kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian sesuatu terhadap yang lain, untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Kekhususan tersebut mestilah diakui oleh syara'.⁶ Ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh ulama fiqh, antaranya:⁷

1. Hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.
2. Kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.
3. Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan.
4. Kekhususan yang terlindung.

Dalam menggunakan hak, Jalaluddin Abdul Rahman merumuskan kaedah *La darara wala dirara* yang berasal dari Hadis dan dimuat dalam kaedah *al dararu yuzal*, yang berarti dalam menggunakan hak tidak boleh merugikan dan dirugikan. Hak juga tidak boleh digunakan untuk kegunaan yang tidak dibenarkan oleh syara'.⁸ Prof. Dr. Hamka mengaitkan antara hak dengan kewajiban.⁹ Dalam kamus Al-Marbawi.¹⁰ Hak diartikan dengan: ada *mustahak* ia, ada berpatutan, benar dan betul. Hak juga berarti kebenaran, keapstian, ketetapan, keistimewaan yang dilindungi.¹¹

Dalam Kamus Dewan, hak berarti: 1. (yang) benar, kebenaran; 2. kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu (ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain); 3. milik keupayaan.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan, dinyatakan bahwa "hak" adalah izin, pengabulan, kebenaran, kuasa, kuat kuasa, milik, kepunyaan, bahang, bahagian, sungguh ada dan

⁵ *Ensiklopedi Islam*, Tim Penyusun, Jilid II, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 67-68.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 486.

⁸ Jalaluddin Abdul Rahman Bin Abi Bakr Al-Syuthi, *Al-Ashbah wa An-Naza'ir*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 113.

⁹ Hamka, *Lembaga Hidup*, (Bandung: Abas, 1976), hlm. 97-103.

¹⁰ *Kamus Al-Marbawi*, M. Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, Juz 1, (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-Anbiyah, t.t.), hlm. 140-141.

¹¹ *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Tim Penyusun, (Kuala Lumpur: Era Visi Publication, 2003), hlm.75.

¹² *Kamus Dewan*, Tim Penyusun, Edisi Ke-4, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 500.

kewenangan.¹³ Dari berbagai-bagai defenisi di atas, dapat diambil kasusimpulan bahwa syara' adalah di atas hak dan kewajiban. Ini kerana hanya Allah sebagai pembuat syara' yang mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Menurut Abu al-A'la al-Mawdudi, hak asasi manusia yang dianugerahkan Allah Swt. Itu bersifat permanen dan abadi. Hak-hak tersebut tidak dapat dirobah, dimodifikasi ataupun dihapuskan.

Dalam Islam terdapat hak untuk hidup (QS. al-Maaidah (5): 32), (QS. al-An'am (6): 151), hak hidup dengan aman (QS. Ali Imran (3): 75), kehormatan wanita (QS. al-Isra' (17): 32), kemerdekaan individu, hak memperoleh keadilan, hak persamaan wanita (QS. Thaha (20): 30).¹⁴ Hak-hak warganegara dalam Islam menurutnya ialah, hak keamanan hidup dan harta benda, perlindungan kehormatan. Keharmonian dan keamanan kehidupan pribadi, kebebasan pribadi, hak untuk memprotes, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan bersyarikat, kebebasan hati nurani dan keyakinan. Kebebasan keyakinan beragama, perlindungan dari perilaku semena-mena, hak atas keperluan hidup yang pokok. Hak persamaan di hadapan hukum, penguasa tidak berada di atas hukum, hak untuk menghindari dosa, hak ikut serta dalam pemerintahan. Menurut Abdul Wahaf Khalaf pula, manusia mempunyai kebebasan antara lain, kebebasan pribadi, kebebasan diri, kebebasan tempat tinggal, kebebasan hak milik, kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan pendidikan dan hak persamaan.¹⁵

Konsep Kehakiman Dalam Islam

Manusia muslim dalam dunia ini berhak menggunakan hak kolektif mereka yang abash, yaitu hak menentukan nasib sendiri, menentukan sistem pemerintahan dan undang-undang negara mereka sendiri untuk mewujudkan jati

¹³ *Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan*, Haji Zainal Abidin Safarwan, (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2002), hlm. 846.

¹⁴ Tahir Mahmood, *Human Rights In Islamic Law*, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), hlm. 4-11. Lihat juga Abul a'la al-Mahududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj. Ahmad Washi Budiman, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 19-20.

¹⁵ Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Siasah Syari'ah Dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Moh. Hafiz Mohayidin, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2003), hlm. 12.

diri ke Islam. Termasuk menerapkan perundangan Islam.¹⁶ Dalam beberapa kasus, perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan tidak menjamin tercapainya hasrat bahwa orang Islam akan dihakimi berdasarkan undang-undang Islam oleh Mahkamah Syariah.¹⁷ Secara umumnya, kewenangan (bidang kuasa) yang dimiliki oleh Mahkamah Syariah di Malaysia tidaklah berbeda jika hendak dibandingkan ketika zaman kemerdekaan lagi. Sumber bidang kuasanya adalah berdasarkan kepada Senarai negeri. Jadual Sembilan memberikan kuasa perundangan kepada negeri melainkan dalam soal-soal jinayah.¹⁸ Ini berarti bahwa hak-hak umat Islam yang berjumlah lebih 60% di Malaysia, untuk memperoleh pengadilan sesuai dengan ajaran agamanya belum mendapatkan keadilan yang semestinya.

Walaupun peradilan agama adalah pengadilan yang mandiri dan sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara,¹⁹ namun masih terlihat kongkongan dalam bidang kausa yang hanya dibatasi oleh undang-undang keluarga sahaja. Dan ini tidak mewakili rasa keadilan bagi penganut agama Islam yang berjumlah lebih 85% di Indonesia saat ini. Beberapa konsep kehakiman dalam Islam adalah:

1. Undang-Undang yang digunakan dalam proses penghakiman hendaklah hukum syara'.²⁰ Ini termaktub dalam hadis ketika Nabi mengutus Muadz Bin Jabal sebagai Hakim.
2. Bidang kuasa kehakiman adalah luas merangkumi semua bentuk pertikaian dan perbalahan.²¹ Mengutip pendapat al-Mawardi, Zaini Nasohah mengatakan

¹⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Reformasi Perundangan Islam*, Terj. Omar Said (et. al.), (Kuala Lumpur: MEGC, 2006), hlm. 1.

¹⁷ Farid Sufian Shuaib (et.al.), *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tata Cara Mahkamah Syariah*, (Kuala Lumpur: DBP, 2005), hlm. 23.

¹⁸ Siti Shamsiah bt. Mohd. Supi, <http://www.ikim.my>, akes 21 Mei 2013.

¹⁹ Abdul Monir Yaacob (ed), *Peradilan Agama di Indonesia dalam Sistem Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: IKIM, 2001), hlm. 90.

²⁰ Abdul Halim el-Muhammady, *Perkembangan Undang-Undang Islam*, (Selangor: Budaya Ilmu, 2003), hlm. 21-22.

²¹ Siti Zulaikhah Haji Md Mor (et.al.), *Al-Syariah Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: DBP, 2004), hlm. 4.

bahwa bidang kuasa Mahkamah Syariah sangat luas yang merangkumi hak Allah, hak manusia, dan hak Allah serta hak manusia.²²

3. Mahkamah berhak mengadili perkara yang berkaitan antara orang Islam dengan non Islam.²³
4. Melaksanakan keadilan mutlak bagi seluruh manusia.²⁴

Tahapan-tahapan dalam pengambilan dan penetapan hukum tersebut, secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Tahapan Undang-Undang

No	Hukum Islam	Mahkamah Syariah/Peradilan Agama
1.	Al-Qur'an dan Sunnah (Konsep Nash)	Sidang Ahli Dewan (Legislatif)
2.	Ulama (Hakim yang memahami Hukum Islam)	Mahkamah (Yudikatif)
3.	Pemerintah (Penguatkuasaan Polis dan sebagainya)	Pemerintah (Executif)
4.	Manusia (Muslim dan Non Muslim)	Umat Islam saja

Kewenangan Mahkamah Syariah Di Malaysia

Undang-Undang Islam telah dilaksanakan sebelum kedatangan penjajah lagi di Tanah Melayu ini. Ini terbukti dengan adanya Qanun Malaka yang berasaskan pada mazhab Syafi'e. Hukum kanun ini dikatakan juga mempengaruhi negeri lainnya seperti Undang-Undang Pahang dan Undang-Undang Johor. Di samping Undang-Undang Islam telah lama ada di tanah Melayu, bidang kuasanya pula luas seperti bidang jinayah, sipil, keluarga, acara dan jihad.²⁵

Kewenangan (bidang kuasa) Mahkamah Syariah di Malaysia antara lain, Berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkawinan, perceraian, mas kawin, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak,

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Shalaby, *Sistem Kehakiman dalam Islam*, (Singapore: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 50.

²⁴ Haron Din, *Islam, Keadilan Membebaskan Manusia*, (Selangor: PTS Publication, 2007), hlm. 7.

²⁵ Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), hlm. 38-39.

penjagaan anak, pemberian, pembahagian harta dan amanah bukan kebaikan, wakaf Islam dan takrif serta peraturan mengenai amanah kebaikan dan kebaikan agama, pelantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan kebaikan, yayasan, amanah, kebaikan dan yayasan kebaikan yang dijalankan kasusemuanya sekali dalam negeri, Adat istiadat Melayu, Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau hasil agama yang seumpamanya, masjid atau mana-mana tempat sembahyang umum untuk orang Islam.

Mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam, kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan, keanggotaan, penyusunan dan cara bagi mahkamah-mahkamah Syariah, yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang persekutuan, mengawal pengembangan itikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam, menentukan perkara-perkara Hukum Syara' dan itikad dan adat istiadat Melayu.²⁶ Sehubungan dengan ini, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Selangor telah membentuk beberapa kategori jenayah yang tertentu, yaitu:²⁷

1. Kesalahan berkaitan akidah seperti menyebarkan doktrin palsu dan takfir.
2. Berhubungan dengan kasusucian agama Islam dan institusinya seperti menghina perkara-perkara yang berkait dengan agama, pihak berkuasa agama, fatwa, ingkar perintah mahkamah, berjudi, minum arak dan minuman yang memabukkan, tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menunaikan sholat Jummat dan tidak membayar zakat atau fitrah.
3. Berhubung dengan kesusilaan seperti sumbang mahram, pelacuran, hubungan jenis, khalwat, lelaki berlagak seperti pondan dan perlakuan tidak sopan di khalayak umum.

²⁶ <http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com-article&grp=2&sec=&key=723&cmd=resetall>, akses 18 Juni 2013.

²⁷ Bidang kuasa ini juga dijelaskan oleh Dato Haji Daud Bin Muhammad. Lihat Abdul Monir Yaacob (ed), *Op. Cit.*, hlm. 33-40.

4. Kesalahan pelbagai seperti membawa lari wanita yang sudah bersuami, menghalang pasangan yang telah bernikah daripada menjalani kehidupan sebagai suami isteri, menghasut suami isteri supaya bercerai atau meninggalkan kewajiban, menjual atau memberi anak kepada bukan Islam, qazaf (menuduh zina), mengutip zakat tanpa kebenaran dan menyalahgunakan tanda halal.²⁸

Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa mal yang hampir menyeluruh dan merangkumi banyak aspek kekeluargaan Islam, yaitu:²⁹

1. Berkaitan dengan isu-isu sebelum pernikahan. Seperti putus tunang, permohonan kebenaran untuk berkhawin dan permohonan untuk berpoligami.
2. Berkaitan dengan persoalan semasa perkhawinan. Seperti permohonan menegashkan perkawinan, permohonan membatalkan perkawinan yang tidak sah, permohonan nafkah diri, nafkah anak, menetapkan isteri nusyuz, permohonan isteri supaya suami hidup bersama semula dan sebagainya.
3. Berkaitan dengan persoalan pembubaran perkawinan. Permohonan cerai khulu, li'an, fasakh, talak, ta'liq, perceraian dengan perintah, kerana murtad dan juga secara anggapan mati.
4. Sebarang permohonan di dalam sesuatu kasus sedang berjalan (*interlocutory order*) contohnya, permohonan sementara nafkah sama ada diri dan anak, hadanah, perintah larangan terhadap harta dan gangguan.
5. Isu-isu yang berbangkit selepas perceraian. Perkara-perkara ini boleh dirujuk di mahkamah yang ada bidang kuasanya, yaitu selepas perceraian berlaku. Umpamanya, sugu hati (*mut'ah*) selepas perceraian, harta sepencarian, nafkah iddah, nafkah anak, nafkah tertunggak dan juga soal *hadhanah* (penjagaan anak).
6. Permohonan-permohonan mengenai wasiat, wakaf dan harta pustaka.
7. Permohonan penguatkuasaan perintah mahkamah.

Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Mahkamah Syariah 2004 Bahagian II. Seksyen 11. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. (3) Mahkamah Tinggi

²⁸ *Ibid.*

²⁹ <http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State-Enact-Ori.nsf/100ae747c720508e748256faa00188094/ce4c8af7bfbe4c7348257155000dee13>, akses 18 Juni 2013.

Syariah hendaklah, (a) dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah Enakmen Majlis Agama Islam Negeri Sabah 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang berkuat kuasa yang memberi Mahkamah Tinggi Syariah bidang kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan, dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan di dalamnya, dan (b) dalam bidang kausa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosidig jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan:³⁰

1. Pertunangan, pernikahan, ruju, perceraian, pembubaran pernikahan (*fasakh*), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (*faraq*) atau apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri;
2. Apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan (i)
3. Nafkah orang-orang tanggungan, kesusahatarafan, atau penjagaan atau jagaan (*hadhanah*) kanak-kanak;
4. Pembahagian atau tuntutan harta sepencurian;
5. Wasiat atau alang semasa *marad-al-maut* seseorang si mati yang beragama Islam;
6. Alang semasa hidup (*hibbah*), atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan uang atau nilai uang oleh seseorang orang Islam;
7. Wakaf atau nazar dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya;
8. Pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tak berwasiat atau Pelantikan Wasi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya;
9. Penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya;
10. Pengisytiharan bahwa seseorang yang telah mati itu ialah seorang Islam atau sebaliknya pada masa kematiannya;

³⁰ *Ibid.*

11. Pendaftaran dan pengambilan anak angkat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, dan
12. Perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia

Walaupun Indonesia sudah lama merdeka atau terlepas dari penjajah, namun hukum yang berkembang di Indonesia masih didominasi oleh Undang-Undang yang dibuat dan diwariskan oleh penjajah. Padahal sudah sewajarnya negara-negara yang sudah lama merdeka ini menghapuskan hukum yang diwariskan oleh penjajah dan diganti dengan hukum yang dianggap sesuai dengan alam kemerdekaan yang digali dari nilai-nilai murni yang terdapat dalam masyarakat.³¹

Secara umumnya bidang kuasa Pengadilan Agama di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijelaskan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, bidang kuasa itu adalah bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.³² Padahal dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan percayanya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³³

Ramly Hutabarat mengemukakan empat alasan mengapa Peradilan Agama perlu di Indonesia, yaitu: 1. Alasan histories, ini kerana jauh sebelum adanya Negara Indonesia hukum Islam sudah ada dan eksis di kepulauan ini seperti yang dilakukan di Aceh, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain melalui kerajaan melayu

³¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 25.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 53-54.

³³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Islam silam. Bahkan penjajah Belanda pun mengakui keberadaan peradilan agama ketika itu. 2. Alasan sosiologis ini kerana umat Islam Indonesia adalah yang paling ramai di dunia dan rakyat yang mayoritas itu memiliki kewajiban mematuhi syariat Islam sebagai agamanya. 3. Alasan Yuridis Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan empat lembaga Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan empat lembaga peradilan di Indonesia yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan agama dan peradilan militer. 4. Alasan politis, yaitu pemerintah berkewajiban menyalurkan aspirasi rakyat sebagai audiennya.³⁴

Seiring perkembangan zaman, maka bidang kuasa Peradilan Agama di Indonesia juga mengalami perubahan. Bidang Kuasa Mahkamah Syariah di Indonesia menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah.

Ketentuan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut.³⁵

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara,

³⁴ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 163-164.

³⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'iyah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun.³⁶

Dalam Undang-Undang ini kewenangan peradilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan keperluan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Dalam penjelasan undang-undang pengadilan agama tersebut dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepadahukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Dan yang dimaksud dengan ”perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:³⁷

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yagn belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;

³⁶ *Ibid.*, Bagian Penjelasan.

³⁷ *Ibid.*

4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau
14. Penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
15. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
16. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
17. Pencabutan kekuasaan wali;
18. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
19. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
20. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya;
21. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
23. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Adapun yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

“Wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga / badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

“Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan /a tau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

“Zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

“Infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi keperluan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah.

“Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Dan adapun yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. Bank syariah, b. lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d. asuransi syariah, e. reksa dana syariah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. pembiayaan syariah, i.

pengadaian syariah, j. dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k. bisnis syariah.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kasusaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.³⁸

Peranan Mahkamah Syariah Dalam Melindungi Hak-Hak Umat Islam

1. Hak-Hak Warganegara Muslim

Kedaulatan tertinggi dalam Islam hanyalah pada hak Allah Swt. Hak Allah itu termaktub dalam kitab al-Qur'an dan dijelaskan oleh Utusan-Nya melalui Sabda Rasulullah Saw. Ini berarti bahwa hukum Allah adalah yang tertinggi dalam konsep kedaulatan dalam Islam. Sementara kekuasaan tertinggi menurut konsep politik Islam adalah berada di tangan rakyat.³⁹

Pemerintahan yang baik (*Good Government*) dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis.⁴⁰ Ini karena pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, diamanahkan kepada sebagian rakyat dan untuk tujuan kemaslahatan rakyat. Dan tentu saja konsep ini berbeda dengan konsep pemerintahan otoritass yang tidak menjadikan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi, tetapi meletakkan individu sebagai penguasa mutlak.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abu Al-Maati Abu Al-Futuh, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, Terj. Md. Akhir Hj. Yaacob, (Bangi: Penerbit UKM, 1991), hlm. 44.

⁴⁰ Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Manajemen Pemerintahan Baru*, (Jakarta: BPKP, 2000), hlm. iii.

Mengutip pendapat Ibn Jarir, Abdul Muin mengatakan bahwa kalimat amanah yang dimaksudkan oleh Surah An-Nisaa ayat 57 ialah ditujukan kepada para pemimpin, agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam.⁴¹ Penjagaan dan penentuan halal-halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh umat Islam adalah bagian hak-hak umat yang wajib dilakukan oleh kerajaannya. Ini karena kerajaan adalah institusi yang paling berwenang dalam menentukan keputusan dan dasar-dasar umum.⁴²

Dasar-dasar umum yang ditentukan itu mestilah berdasarkan masalah dan manfaat kepada rakyat secara amnya. Dalam menjaga hak-hak rakyat yang beragama Islam, Nordin Ahmad dalam tesis doktor-nya mengungkapkan bahwa masih banyak penyimpangan dan penipuan terhadap logo halal yang perlu dipantau oleh pihak yang bertanggung jawab.⁴³ Hal yang sama juga dikemukakan oleh persatuan pengguna Pulau Pinang, yang mengatakan masih banyaknya produk-produk yang tidak halal masih beredar di pasaran.⁴⁴ Dan masalah yang sama juga berlaku di Indonesia seperti yang dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴⁵ Padahal selaku umat Islam sebagai pengguna mereka memiliki hak terhadap produk dan *service* dan hanya dilindungi oleh Undang-Undang.⁴⁶

Pemerintah ialah pelaksana wewenang ekonomi, politik dan pentadbiran untuk mengelola urusan negara di semua peringkat. Pemerintahan yang baik meliputi semua mekanisme, proses dan lembaga yang merupakan saluran bagi rakyat untuk mewujudkan kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka dan menyambung perbezaan di antara mereka. United Nations Development Programme (UNDP) memperincikan pemerintahan yang baik sebagai partisipasi, kekuasaan hukum (*rule of law*),

⁴¹ Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193.

⁴² Syed Ahmad Husein, *Pengantar Sains Politik*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 43.

⁴³ Nordin Ahmad, *Persepsi Persatuan Pengguna di Malaysia Terhadap Status Pengesahan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*, (Malaysia: Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2004), hlm. 8.

⁴⁴ *Halal Haram: Panduan Persatuan Pengguna Pulau Pinang*, Tim Penyusun, (Pulau Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 2006), hlm. 2.

⁴⁵ "Deadline Vaksin Haram", <http://www.Hidayatullah.com>, akses 10 Juli 2008.

⁴⁶ *Syariah & Undang-Undang*, Prosiding Diskusi, (Kuala Lumpur: KUIM, 2009), hlm. 101.

transparansi, bertanggung jawab (*responsiveness*), orientasi konsensus, persamaan (*equity*), efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas dan strategik.⁴⁷

Penentuan dan pengawasan produk makanan halal adalah kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya yang beragama Islam. Baik pengeluaran makanan yang diusahakan oleh pengusaha tempatan yang beragama Islam ataupun bukan Islam. Terutama terhadap pengeluaran makanan halal yang kebanyakannya diimpor daripada negara-negara bukan Islam.⁴⁸ Ini termasuk dalam kategori hak beragama yang harus dilindungi, mengikut perlembagaan yang diperuntukkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang makanan halal.

Makanan adalah keperluan asas manusia yang hakiki untuk dapat bertahan hidup. Makanan memberikan manusia tenaga untuk dapat bekerja, beribadah dan melakukan berbagai-bagai aktifitas dalam hidupnya. Islam sangat menitik beratkan tentang hal makanan. Konsep makanan dalam Islam dimulai dari pertanian. Penyediaan bekalan makanan yang mencukupi seperti yang digambarkan oleh al-Qur'an tentang kebijaksanaan Nabi Yusuf.⁴⁹ dalam memastikan ketersediaan makanan selalu mencukupi walaupun dalam keadaan krisis makanan di Mesir ketika itu. Hal yang tidak kurang penting tentang makanan dalam Islam, adalah untuk memastikan bahwa makanan yang tersedia itu juga dalam keadaan bersih, sihat, halal dan berkualiti, karena makanan hanyalah wasilah untuk menghasilkan tenaga.

Dalam berbagai-bagai sumber ditemukan bahwa saat ini diperkirakan terdapat 1,4 milyar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, 30% di Asia Selatan yakni Pakistan, India dan Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim

⁴⁷ UNDP, *Governance For Sustainable Human Development, A UNDP Policy Document* (New York: UNDP, 1997), hlm. 8.

⁴⁸ Berita Harian Online, http://161.139.39.251/akhbar/economic_conditions/1998/bh981263.htm, akses 4 Juli 2013.

⁴⁹ Yusuf (12): 55.

juga dapat ditemukand alam jumlah yang signifikan di Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia.⁵⁰ Pada 1998, permintaan makanan halal bagi seluruh dunia dianggarkan berjumlah AS\$80 bilion (RM 280 bilion). Hari ini permintaan makanan halal sedunia dianggarkan berjumlah AS\$150 bilion (RM525 bilion).⁵¹

Suatu hal yang tidak dapat dinafikan bahwa makanan yang beredar di pasaran antarbangsa saat ini, masih dimonopoli oleh makanan yang berasal dari Barat seperti KFC, McDonal, Coca Cola, Fanta dan sebagainya. Dengan jumlah Umat Islam lebih dari 1/4⁵² penduduk dunia dan menguasai 75% kekayaan bumi berupa minyak dan bahan tambang lainnya saat ini, mayoritas penduduk di negara-negara Islam masih hidup di bawah miskin tegar, kurang berpendidikan dan kurang makan, karena mayoritas negara Islam masih mengimpor bahan makanan dari negara luar dan oleh sebab kekayaan alamnya dikuasai oleh pihak asing.

2. Hak-Hak Umat Islam Dalam Makanan Halal

Konsep halal haram dalam Islam telah ada seiring dengan lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Melalui tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Namun lahirnya program halaisasi dikira masih baru dalam peradaban dunia. Adanya perbankan Islam, Insurans Islam dan logo halal adalah masih sesuatu yang baru lagi dan perlu dikaji serta dianalisa oleh para ilmuwan agar ia menepati matlamat sebenarnya. Program halaisasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak umat Islam yang jumlahnya 1,8 bilion di dunia saat ini. Ini karena jumlah umat Islam yang ramai itu mayoritasnya masih disebut sebagai masyarakat pengguna. Sementara kebanyakan produk makanan masih di impor dari negara-negara yang bukan Islam.

Program ini tidak akan berjalan seperti yang diinginkan dan akan menemui kegagalan kalau tiada kasusungguhan dan sokongan dari berbagai-bagai pihak terhadapnya. Sebagai pengeluar mereka harus menjaga kepentingan umat Islam

⁵⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Islam>, akses 10 Juli 2008.

⁵¹ <http://www.jphpk.gov.my/Malay/berita/Jan07%2029a.htm>, akses 10 Juli 2008.

⁵² <http://www.harunyahya.com/indo/artikel/067.htm>, akses 10 Juli 2008.

terutama dalam hal makanan halal. Sebagai pengguna masyarakat Islam harus peduli tentang prinsip-prinsip agama mereka terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan halal dan haram. Dan sebagai kerajaan harus bertanggung jawab dalam menentukan dan mengawasi produk makanan halal dengan amanah dan seksama.

Di Malaysia terdapat Bahagian Hub Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang sekarang diambil alih oleh Halal Development Corporation (HDC). Di Indonesia pula terdapat Lembaga Pengkajian Pangan (makanan) Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI). Kedua badan diatas bertugas menguruskan tentang makanan halal. Akan tetapi keduanya tidak memiliki bidang kuasa penguatkuasaan atas pelanggaran hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan isu makanan halal ini.

Dalam Undang-Undang Islam pihak yang bertanggung jawab atas kemudaratan yang disebabkan oleh premis ditanggung oleh pemilik premis tersebut.⁵³ Begitu juga terhadap penyalahgunaan isu yang berkaitan dengan makanan halal di tanggung oleh pembekal tentunya.

Penutup

Bidang kuasa Mahkamah Syariah di Indonesia dan Malaysia masih berstatus “anugerah” dari penguasa dan pemerintah. Padahal status hukum dalam Islam harus mendahulukan Nash yang terdapat dalam al-Qur’an, kemudian Nash yang terdapat dalam Hadis Nabi Saw. Kemudian Ijmak dan Qiyas atau Ijtihad Ulama Mujtahid. Ini berarti ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan dua sumber hukum dan berbagai-bagai metode pengambilan hukum dalam Islam tidak dapat diterima.

Bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia tidak termasuk dalam melindungi hak-hak umat Islam dalam bidang perbankan Islam dan insurans Islam. Sementara wewenang Peradilan Agama di Indonesia tidak berkuasa

⁵³ Abdul Basir Bin Muhammad, “Tanggungjawab Pemunya Premis Menurut Perspektif Undang-Undang Tort Islam”, Dalam Irwan Mohd Subri (ed), *Kajian Syariah Undang-Undang*, (Kuala Lumpur: KUIM, 2003), hlm. 92.

mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penyelewengan makanan halal.

Semua program yang melindungi hak-hak umat Islam seperti perbankan Islam, Insurans Islam dan Makanan Halal, tidak akan berjalan seperti yang diinginkan, kalau sahaja tidak mendapat sokongan dari pemerintah. Sokongan itu diperlukan dalam bentuk nyata yaituperlunya dimasukkan dalam bidang kuasa mahkamah, agar pihak-pihak yang merasa dizalimi boleh mencari keadilan melalui jalan yang betul.

Diskriminasi bidang kuasa mahkamah syariah di masa penjajah dahulu dapat diterima dan dimaklumi. Ini kerana negara berada dalam kekuasaan orang bukan Islam dan kualiti pendidikan orang Islam ketika itu belum mampu menerajui mahkamah. Hamka menjelaskan bahwa orang Islam dimasa penjajah sangat anti terhadap penjajah yang bukan Islam. Apapun yang berasal dari penjajah ditolak, termasuk pendidikan. Umat Islam lebih memilih pendidikan pondok dari pendidikan modern ketika itu. Akan tetapi alasan itu tidak dapat diterima lagi saat ini. Karena negara sudah berada dalam kekuasaan orang Islam dan para hakim mahkamah syariah pula memiliki taraf pendidikan yang sama dengan taraf pendidikan hakim di mahkamah sipil.

Diharapkan pemerintah peka dalam melindungi hak-hak umat Islam dalam bentuk memberi bidang kuasa yang mengikut kehendak semasa kepada Mahkamah Syariah. Ini bertujuan untuk menjamin rasa keadilan umat yang berhak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan tuntunan agama mereka. Hanya juga berarti bahwa pemerintah memberikan dukungan yang pasti dan nyata ke arah merealisasikan terwujudnya kehidupan Islami dalam masyarakat Islam dalam negara.

Bibliografi

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Abdullah Ahmed An-Na'im, *Reformasi Perundangan Islam*, Terj. Omar Said (et. al.), Kuala Lumpur: MEGC, 2006.

- Abdul Basir Bin Muhammad, "Tanggungjawab Pemunya Premis Menurut Perspektif Undang-Undang Tort Islam", Dalam Irwan Mohd Subri (ed), *Kajian Syariah Undang-Undang*, Kuala Lumpur : KUIM, 2003.
- Abdul Halim el-Muhammady, *Perkembangan Undang-Undang Islam*, Selangor: Budaya Ilmu, 2003.
- Abdul Monir Yaacob (ed), *Peradilan Agama di Indonesia dalam Sistem Kehakiman Islam*, Kuala Lumpur: IKIM, 2001.
- Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahab Khalaf, *Siasah Syariah Dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Moh. Hafiz Mohayidin, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2003.
- Abul a'la al-Mahududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terj. Ahmad Washi Budiman, Bandung: Pustaka, 1985.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Ahmad Shalaby, *Sistem Kehakiman dalam Islam*, Singapore: Pustaka Nasional, 2003.
- Abu Al-Maati Abu Al-Futuh, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, Terj. Md. Akhir Hj. Yaacob, Bangi: Penerbit UKM, 1991.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987.
- Farid Sufian Shuaib (et.al.), *Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tata Cara Mahkamah Syariah*, Kuala Lumpur: DBP, 2005.
- Haji Zainal Abidin Safarwan, *Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2002.
- Hamka, *Lembaga Hidup*, Bandung: Abas, 1976.
- Haron Din, *Islam, Keadilan Membebaskan Manusia*, Selangor: PTS Publication, 2007.
- Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *Muwafaqat Nazariyat Al-Maqwasid Inda Al-Imam Al-Shatibi*, Jilid II, Riyadh: Al-Ma'ahd Al-Islam Lil Fikr Al-Islami, 1992.

- Jalaluddin Abdul Rahman Bin Abi Bakr Al-Syuthi, *Al-Ashbah wa An-Naza'ir*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.
- M. Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, Juz 1, Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-Anbiyah, t.t.
- Nordin Ahmad, *Persepsi Persatuan Pengguna di Malaysia Terhadap Status Pengesahan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*, Malaysia: Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2004.
- Prosiding Diskusi *Syariah & Undang-Undang*, Kuala Lumpur: KUIM, 2009.
- Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Siti Zulaikhah Haji Md Mor (et.al.), *Al-Syariah Kehakiman Islam*, Kuala Lumpur: DBP, 2004.
- Syed Ahmad Husein, *Pengantar Sains Politik*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Tahir Mahmood, *Human Rights In Islamic Law*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Kuala Lumpur: Era Visi Publication, 2003.
- Tim Penyusun, *Kamus Dewan*, Edisi Ke-4, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun, *Halal Haram: Panduan Persatuan Pengguna Pulau Pinang*, Pulau Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 2006.
- Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Manajemen Pemerintahan Baru*, Jakarta: BPKP, 2000.
- UNDP, *Governance For Sustainable Human Development, A UNDP Policy Document* New York: UNDP, 1997.

Peraturan-peraturan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Website

Deadline Vaksin Haram”, [http://www. Hidayatullah.com](http://www.Hidayatullah.com).

<http://www.wikipedia.com>.

<http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com-article&grp=2&sec=&key=723&cmd=resetall>.

[http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State-Enact-Ori.nsf/100ae747c720508e748256faa00188094 / ce4c8af7bfbe4c7348257155000dee13](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State-Enact-Ori.nsf/100ae747c720508e748256faa00188094%20ce4c8af7bfbe4c7348257155000dee13).

[http://www.161.139.39.251/akhbar/economic.conditions / 1998 / bh98 1263](http://www.161.139.39.251/akhbar/economic.conditions/1998/bh981263).

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Islam>.

<http://www.jphpk.gov.my/Malay/berita/Jan07%2029a.htm>.

<http://www.harunyahya.com/indo/artikel/067.htm>.

Siti Shamsiah bt. Mohd. Supi, [http://www. ikim. my](http://www.ikim.my).